



Analisis Tata Kelola Kelembagaan dalam Meningkatkan Akreditasi dan Mutu Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan

Sri Uswatun Hasanah^{1*}, Saipul Annur², Ade Rosad³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Korespondensi penulis: hasanahsriuswatun77@gmail.com

Abstract. *Institutional governance is a critical factor in determining the success of educational institutions in meeting National Education Standards (SNP) and achieving superior accreditation status. This study aims to analyse the role of institutional governance in improving accreditation and education quality based on the eight pillars of SNP. The research employs a descriptive qualitative approach using library research and content analysis of relevant regulations and educational management literature. The findings indicate that the eight SNP standards (content, process, graduate competence, educators, infrastructure, management, funding, and assessment) constitute an integrated framework serving as an objective indicator of education quality. However, their implementation still faces several challenges, including poor documentation quality and limited managerial commitment. This study concludes that strengthening governance through the digitalisation of quality assurance systems and the internalisation of quality culture at the operational level is essential to reduce disparities in education quality and achieve optimal accreditation standards.*

Keywords *institutional governance; education quality; national standards; accreditation quality; SNP*

Abstrak. Tata kelola kelembagaan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memperoleh predikat akreditasi unggul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola kelembagaan dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan dengan merujuk pada delapan pilar SNP. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur (library research) dan analisis isi terhadap regulasi serta literatur manajemen pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa delapan standar SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian) merupakan satu kesatuan integral sebagai indikator objektif mutu pendidikan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas dokumentasi dan terbatasnya komitmen manajerial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola melalui digitalisasi sistem penjaminan mutu serta internalisasi budaya mutu pada tingkat operasional merupakan strategi penting untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan mencapai standar akreditasi yang optimal.

Kata kunci: tata kelola; mutu pendidikan; standar nasional; akreditasi pendidikan; SNP

1. LATAR BELAKANG

Mutu pendidikan merupakan instrumen krusial dalam menentukan daya saing bangsa di era global. Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan diatur melalui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan minimal bagi setiap satuan pendidikan. SNP merupakan instrumen strategis dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional yang mencakup delapan komponen utama, mulai dari kompetensi lulusan hingga sistem penilaian. Meskipun dirancang untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, implementasi SNP di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pendidik terhadap standar, keterbatasan sarana dan prasarana,

kesenjangan teknologi, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga (Safitri & Julaiha, 2026).

Kehadiran SNP berfungsi sebagai parameter objektif dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan antarwilayah. Melalui delapan standar tersebut, satuan pendidikan memiliki pedoman yang terstruktur dalam mengelola aspek input, proses, hingga evaluasi hasil pembelajaran secara terukur. Dengan demikian, SNP menjadi landasan penting dalam membangun sistem pendidikan yang akuntabel dan transparan. Keberhasilan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan seluruh komponen standar tersebut menjadi indikator bahwa institusi telah memenuhi kriteria kelayakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kelayakan ini selanjutnya ditegaskan melalui mekanisme akreditasi sebagai proses evaluasi eksternal untuk menilai tingkat pemenuhan standar secara faktual di lapangan (Tardian, 2020).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola kelembagaan dalam meningkatkan akreditasi dan mutu pendidikan dengan mengacu pada delapan pilar SNP. Penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi penguatan tata kelola, khususnya melalui optimalisasi sistem penjaminan mutu dan penguatan budaya mutu di tingkat operasional, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan

Tata kelola lembaga pendidikan merupakan proses pengelolaan institusi yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, tata kelola yang baik harus didukung oleh perencanaan strategis yang terarah, mencakup perumusan visi, misi, tujuan, serta strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, penerapan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan optimalisasi sumber daya. Dengan adanya tata kelola yang terukur, lembaga pendidikan diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan serta menghasilkan lulusan yang kompetitif dan berkarakter (Dewi et al., 2025).

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. SNP terdiri dari delapan standar, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Standar ini menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa capaian mutu pendidikan di satuan pendidikan diukur berdasarkan pemenuhan delapan standar tersebut dan menjadi dasar dalam peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Fahrawaty, 2019).

Akreditasi Pendidikan

Akreditasi merupakan proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja lembaga pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan standar oleh suatu institusi. Selain sebagai alat penilaian, akreditasi juga berperan sebagai sarana evaluasi untuk mendorong perbaikan mutu pendidikan. Akreditasi dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan berfungsi sebagai bentuk penjaminan mutu serta acuan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan secara berkelanjutan (Maulana, 2022).

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai standar (Wachid et al., 2022). Mutu tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang meliputi kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, serta dukungan sarana dan prasarana. Peningkatan mutu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Mutu pendidikan merupakan konsep yang kompleks dan multidimensi yang mencakup kualitas hasil belajar, relevansi lulusan, lingkungan belajar yang kondusif, profesionalitas pendidik, serta ketersediaan fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran (Wachid et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) terhadap berbagai sumber yang relevan, meliputi regulasi pemerintah, buku teks manajemen pendidikan, serta artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan akreditasi pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis keterkaitan antara konsep tata kelola kelembagaan dengan delapan standar dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasi temuan dari berbagai sumber literatur, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait peran tata kelola dalam peningkatan mutu dan akreditasi pendidikan (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola sebagai Fondasi Mutu

Tata kelola pendidikan merupakan elemen fundamental dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Secara konseptual, tata kelola tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Ndjandji (2024) menyatakan bahwa tata kelola pendidikan mencakup upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi secara optimal, baik dalam aspek intelektual, moral, maupun keterampilan.

Dalam praktiknya, tata kelola pendidikan melibatkan serangkaian fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan (Listia et al., 2025). Sejalan dengan pendapat Aswat et al. (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dan tata kelola yang diterapkan, di mana keduanya menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kinerja tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kualitas kepemimpinan kepala sekolah sendiri berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja lembaga pendidikan, terutama ketika kepala sekolah memiliki kemampuan manajerial yang baik, mampu membangun kerja sama antar staf, dan mendorong inovasi dalam proses pembelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja guru dan mutu pendidikan secara keseluruhan (Amani, 2023).

Efektivitas tata kelola kelembagaan juga semakin diperkuat melalui penerapan sistem akreditasi sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan. Dalam Apriliyani dan Bisri (2026) akreditasi mampu mendorong lembaga pendidikan untuk memperbaiki sistem manajemen, meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, serta memperkuat

akuntabilitas kelembagaan. Dengan adanya tuntutan pemenuhan standar dalam proses akreditasi, lembaga pendidikan terdorong untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara lebih sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak dapat dipisahkan dari mekanisme evaluasi eksternal seperti akreditasi, karena keduanya saling melengkapi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penguatan tata kelola tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar administratif, tetapi juga menuntut adanya reformulasi manajemen mutu yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nasrun et al. (2026) menegaskan bahwa manajemen mutu yang efektif harus dibangun melalui penguatan budaya mutu (*quality culture*), sistem penjaminan mutu berbasis data, serta kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan secara adaptif. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing lulusan melalui pengelolaan mutu yang sistematis dan berkelanjutan.

Relevansi Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Mutu pendidikan di Indonesia diukur berdasarkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. SNP merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan sebagai upaya menjamin kualitas pendidikan secara nasional.

Secara struktural, SNP terdiri atas delapan standar utama, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Kedelapan standar tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui pemenuhan seluruh komponen secara simultan.

Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di tingkat satuan pendidikan belum menunjukkan keseragaman, meskipun standar tersebut telah ditetapkan sebagai acuan nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan manajerial yang dimiliki masing-masing lembaga (Maranting et al., 2020). Dalam perspektif manajemen mutu, Sallis (2014) melalui konsep *Total Quality Management in Education* menegaskan bahwa keberhasilan

peningkatan mutu tidak cukup hanya dengan menetapkan standar, tetapi sangat ditentukan oleh bagaimana standar tersebut dijalankan secara konsisten serta didukung oleh budaya mutu yang berkembang dalam organisasi pendidikan.

Oleh karena itu, SNP tidak hanya dipahami sebagai batas minimal yang harus dipenuhi, melainkan juga sebagai pedoman yang dapat mengarahkan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui implementasi yang konsisten dan komitmen bersama di dalam lembaga pendidikan.

Tantangan dan Strategi Peningkatan

Pencapaian akreditasi yang optimal masih menjadi tantangan bagi banyak satuan pendidikan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas manajemen dokumentasi, yang sering kali tidak mencerminkan kondisi riil pelaksanaan standar di lapangan. Selain itu, kurangnya komitmen manajerial dari pimpinan lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam proses peningkatan mutu.

Temuan BAN-S/M (2022) menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek tata kelola dan administrasi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya peringkat akreditasi di berbagai satuan pendidikan. Dalam konteks ini, perubahan dalam organisasi pendidikan tidak dapat berlangsung secara optimal tanpa adanya kepemimpinan yang kuat serta dukungan dan komitmen kolektif dari seluruh elemen lembaga. Selain itu, berbagai hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi manajemen mutu yang belum berjalan secara optimal, seperti keterbatasan sumber daya, tingginya beban kerja guru, serta adanya resistensi terhadap perubahan, turut menjadi kendala dalam upaya mencapai akreditasi yang lebih baik (Supandi et al., 2026; Hasan & Anita, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi yang lebih adaptif, salah satunya melalui digitalisasi sistem penjaminan mutu. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses dokumentasi, monitoring, dan evaluasi dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Selain itu, internalisasi budaya mutu pada level operasional, khususnya pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi kunci dalam memastikan bahwa standar tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga diimplementasikan secara substantif dalam praktik pembelajaran.

5. KESIMPULAN

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang bermutu, akuntabel, dan transparan guna

meminimalisir disparitas kualitas antarwilayah. Delapan standar dalam SNP merupakan satu kesatuan integral yang memerlukan tata kelola kelembagaan yang kuat agar dapat berfungsi sebagai penggerak dalam mengelola input, proses, hingga evaluasi hasil belajar. Namun, pencapaian akreditasi maksimal seringkali terhambat oleh rendahnya kualitas manajemen dokumentasi dan minimnya komitmen manajerial dari pimpinan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi strategis melalui akselerasi digitalisasi sistem penjaminan mutu dan penguatan budaya mutu di tingkat operasional. Melalui tata kelola yang efektif dan komitmen yang tinggi, satuan pendidikan tidak hanya mampu memenuhi kriteria kelayakan formal, tetapi juga dapat melampaui standar minimal untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliyani, M. V., & Bisri, M. (2026). Akreditasi sebagai instrumen manajemen mutu dan produktivitas lembaga pendidikan: Tinjauan konseptual berbasis *total quality management*. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 27–38.
- Fatmawati, S. (2026). Reformulasi manajemen mutu berkelanjutan pada madrasah dalam meningkatkan daya saing lulusan di era transformasi pendidikan nasional. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 192–201. <https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42950>
- Listia, D., et al. (2025). Administrasi tata kelola pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *Aptana: Jurnal Ilmu & Humaniora*, 1(1), 17.
- Maranting, H. S., Arif, M., & Mala, A. R. (2020). Implementasi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan daya saing madrasah ibtidaiyah negeri 1 Gorontalo. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1765>
- Ndjandji, A. U. (2024). Tata kelola penyelenggaraan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9314>
- Safitri, Y., & Julaiha, S. (2026). Implementasi standar nasional pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.31538/adrg.v6i1.2691>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Supandi, H., Qomariyah, S., Sa'adah, S. T. F., & Magfiroh, V. S. (2026). Implementasi manajemen mutu pendidikan dalam pencapaian akreditasi A di MI Darul 'Amal. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 13904–13911. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5909>
- Tardian, A. (2020). *Manajemen strategik peningkatan mutu pendidikan di SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto* (Tesis). Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

- Amani, K. (2023). Evaluasi program pengembangan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1592-1605. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2255>
- Maulana, M. I. (2022). Peran sistem akreditasi dalam meningkatkan produktivitas di lembaga pendidikan. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 47-57. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i1.15867>
- Widyaiswara, L. P. M. P. CAPAIAN 8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI PADA JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2019 Fahrawaty. *JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN*, 41. <https://bbpmpsulsel.kemendikdasmen.go.id/assets/document/f591c4cc6893d1718f3eeb96135ddd14.pdf#page=45>
- Dewi, F. H. M. P., La'i, H. N., Zahra, I. Y., & Darojah, Z. (2025). Perencanaan Strategis Dan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Yang Terukur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1013-1024. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1230>
- Hasan, M., & Anita, A. (2024). Penerapan manajemen mutu terpadu terhadap efisiensi administrasi sekolah dalam meningkatkan akreditasi unggul di MTs Al Hidayah Marga Agung Lampung Selatan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(001), 217-232. <https://doi.org/10.30868/im.v7i001.7494>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Manajemen mutu dalam penyelenggaraan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 6(1), 29-36.